

## Daftar Kepustakaan

### A. Buku

Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasyim Jalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua cetakan ke 14)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nunung Mahmudah, 2015, *Ilegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

Ketut Darmika, 2015, “*Penegakan Hukum tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*” , Hlm: 488, <http://oaji.net/articles/2016/3905-1474346935.pdf>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 Pukul 12.25 WIB

Lufsiana, “*Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan*”, Dikutip dari <http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/>, Diakses tanggal 21 November 2017.

Nursapia Harahap, 2014 “*Penelitian Kepustakaan*”, <http://www.download.portalgaruda.org> diakses tanggal 10 September 2017 pukul 12:15 WIB

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti  
Kapal

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Kemanan  
Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.18/MEN/2011  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan  
Perikanan Nomor Per.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi  
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/643/KPTS/2016  
Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang  
Perikanan Provinsi Sumatera Utara

#### **D. Internet**

<http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses pada tanggal 2 Oktober

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150127142356-92-27685/susi-pudjiastuti-instruksi-peneggelaman-kapal-di-presiden/>,

diakses pada tanggal 21 November 2017 Pukul 20.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/2769424/ada-5-alasan-kenapa-peneggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>, diakses pada tanggal

18 November 2017 Pukul 22.00 WIB

<http://www.pemudamaritim.com/2016/03/pro-kontra-kebijakan-menteri-susi.html>, diakses Pada tanggal 20 November 2017 Pukul

20.00 WIB.